

DPR KEBABLABLASAN!

Bikin Aturan Baru Bisa Copot Pejabat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kebablasan. Penilai tersebut dilontarkan kalangan akademisi dan pengamat terkait aturan baru hasil revisi tata tertib (tatib) DPR nomor 1 tahun 2020. Kini para legislator tersebut bisa mengevaluasi jabatan publik yang diemban melalui mekanisme fit and proper test di DPR. DPR juga bisa memberikan rekomendasi pergantian pejabat publik jika kinerja mereka tidak memuaskan. Ada sedikitnya 300-an pejabat yang mesti diseleksi dan dipilih di DPR. Diantaranya Pimpinan KPK--termasuk Dewan Pengawas KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Panglima TNI dan Kapolri. Mencuat dugaan tatib sengaja diubah hingga bisa mengintervensi pejabat publik lintas kementerian karena DPR mempunyai kepentingan tertentu. DPR sendiri berkukuh, tatib baru itu akan berdampak positif karena bisa dilakukan evaluasi secara berkala untuk kepentingan umum. Revisi tersebut dianggap sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan agar pejabat publik tetap bertanggung jawab terhadap kinerja mereka. Adakah jaminan tidak dijadikan alat politik?

Baca Hal 11....

○○○

PASAL BARU DALAM TATIB DPR TERKAIT EVALUASI PEJABAT PUBLIK

Pasal 228 A

○ Ayat (1)

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud Pasal 227 ayat (2) DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

○ Ayat (2)

Hasil evaluasi yang sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.



Tragedi Truk Rem Blong Terulang Lagi, Telan 8 Korban Tewas di GT Ciawi

Kecelakaan akibat truk yang mengalami rem blong terus saja terjadi. Pada Selasa (4/2/2025) malam, truk bermuatan galon menabrak 5 kendaraan di gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Sekitar 8 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka. Berita terkait baca halaman 4.(antara.ist)



Prabowo Ultimatum Aparat Halangi Kebijakan Pemerintah: **Saya Tindak Saudara!**

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para aparat pemerintah untuk menyukseskan program-program pemerintah. Prabowo memperingatkan bahwa ia bakal menindak pihak yang menghalang-halangi.

"Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak Saudara-saudara skalian," kata Prabowo dalam acara puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo meminta para pejabat pemerintah untuk bekerja sungguh-sungguh demi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. "Saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saaudara-saudara, kita bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," kata dia.



Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Ist

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga meminta seluruh anak buahnya untuk membersihkan diri. "Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat untuk pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, akan saya tindak,"

ucapnya.

Prabowo pun mewanti-wanti bakal membersihkan institusi yang tidak mau membersihkan diri. "Saya berharap ada kesadaran, saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh isntitusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan!" kata dia.

Dalam kesempatan itu Prabowo juga mengaku mendapatkan informasi ada pihak yang menyebut dirinya bodoh dan bajingan. Umptan itu disampaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Namun, Prabowo enggan menyebut siapa pihak itu.

"Jangan kira kami ini bodoh, memang ada yang mengatakan saya ini tolol, enggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, saya enggak sebut namanya kalian sudah tahu loh," kata Prabowo.

Meski disebut bodoh, Prabowo mengaku tidak mempermasalahkannya. Dia berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyimpangan. Komitmen itu dilakukan dengan memerintahkan aparat dan institusi membersihkan diri. (din, rls, ant/dya)

Menkes: Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026

JAKARTA- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membuka opsi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Ia menyebut, per tahun 2026 ada kemungkinan iuran BPJS bakal dinaikkan.

"Saya sudah bilang ke bapak [Presiden Prabowo], kalau hitungan kami dan bu Menkeu di 2025 harusnya aman. Di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment dari tarifnya," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025)

Budi mengatakan, di tahun 2025 diprediksi keuangan BPJS Kesehatan masih mampu untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat di Indonesia tanpa kenaikan iuran. Namun, di 2026 perlu ada penyesuaian iuran.

"Rencananya [penyesuaian tarif] di 2026. Tapi sedang dikerjakan Kementerian Keuangan, BPJS, dan Kementerian Kesehatan," sambung dia.

Soal angka kenaikan iurannya, Budi Gunadi mengatakan masih dalam tahap perhitungan. Dia dan Sri Mulyani sudah mulai intensif untuk membahas hal tersebut.

"Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau. Tapi sudah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan, dengan intensifikasi program sesuai rencana kerja dan anggaran (RKA), gagal bayar berpotensi terjadi pada Juni 2026.

Sebab itu, strategi keberlanjutan JKN diantaranya melalui penyesuaian iuran sesuai Perpres 59/2024 atau selambatnya 1 Januari 2026.

Pending Klaim di Jatim

BPJS Kesehatan memang terus disorot. Terbaru, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menginvestigasi kasus pending klaim BPJS Kesehatan di rumah sakit yang ada di wilayahnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Agus Muttaqin menjelaskan, pihaknya akan meminta data primer dari Persi Jawa Timur terkait kasus tersebut dan berencana melakukan komunikasi minggu ini.

Sebelumnya, Persi Jawa Timur melaporkan adanya pembayaran klaim tertunda oleh BPJS Kesehatan yang diperkirakan Rp 500 miliar.

Besarnya pending klaim tersebut untuk 12.000 pelayanan di 439 rumah sakit di Jawa Timur.

"Kami akan himpun datanya. Sesungguhnya berapa rumah sakit

yang mengalami pending klaim di BPJS Kesehatan. Kemudian, mengapa ada pending klaim," kata Agus Muttaqin, Rabu (5/2/2025).

Agus menjelaskan, fokus Ombudsman adalah menangani keluhan dari masyarakat yang dirugikan akibat kasus pending klaim tersebut.

Sejauh ini, Ombudsman belum menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus ini. Namun, Agus mengatakan bahwa jika ada warga yang melapor dan merasa dirugikan karena tidak mendapatkan layanan akibat pending klaim, Ombudsman akan segera memproses dan memeriksa kasus tersebut secara resmi.

"Contohnya seperti di Jakarta kan ada namanya LBH Kesehatan. LBH Kesehatan nanti menerima kuasa dari pasien beberapa pasien yang merasa dirugikan. Karena kasus pending klaim tersebut di RS, pasien jadi tidak mendapatkan layanan. Nah, itu kami baru menerima proses dan kami periksa secara resmi," jelasnya.

Menurut Agus, kasus pending klaim di Jawa Timur telah menjadi isu yang meluas dan kemungkinan juga terjadi di luar Jawa Timur. Sehingga perlu diambil alih oleh Ombudsman RI. (din, ist, rls/dya)

IURAN BPJS KESEHATAN MASYARAKAT BUKAN PEKERJA (BP):

- Kelas 1 sebesar Rp150.000 per orang per bulan.
- Kelas 2 sebesar Rp100.000 per orang per bulan.
- Kelas 3 sebesar Rp35.000 per orang per bulan

Ket:

- Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7.000.)
- Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI): Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU):

- Iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PPU di sektor pemerintah serta BUMN/BUMD/Swasta adalah 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta. Sementara itu, untuk keluarga tambahan PPU seperti anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, serta mertua, dikenakan iuran sebesar 1% dari gaji per orang yang dibayar oleh pekerja.

Veteran:

- Terakhir, iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.



Mayoritas Gugatan Pilkada 2024 Kandas

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan 55 perkara perselisihan hasil Pilkada 2024 pada sesi kedua sidang putusan dismissal di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (5/2/2025). Mayoritas perkara yaitu sebanyak 48 telah diputus dan tujuh perkara lainnya dilanjutkan pada sidang pembuktian.

"48 perkara yang telah diucapkan baik berupa ketetapan putusan. Artinya, masih ada 7 perkara lain yang tidak diucapkan dan itu akan lanjut ke pembuktian berikutnya atau pembuktian lanjutan," kata Hakim Saldi Isra di Gedung MK pada Rabu (5/2/2025).

Adapun tujuh perkara yang lanjut ke sidang pembuktian yaitu Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara, Pilkada Kabupaten Barito Utara, Pilkada Kabupaten Siak, Pilkada Kabupaten Berau, Pilkada Kabupaten Pamekasan, Pilkada Halmahera Utara dan Pilkada Kabupaten Belu.

Hingga persidangan hari kedua pukul 18.00 WIB, sudah ada 262 perkara yang dibacakan dengan rincian 34 perkara dilanjutkan ke sidang pembuktian sementara sisanya 228 perkara kandas atau gugur. Masih ada sesi 3 yang akan dibacakan malam ini dalam Sidang Dismissal Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta.

Saldi mengatakan, sidang pembuktian akan digelar 7-17 Februari 2025. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi akan secara resmi memanggil para pihak untuk menjadwalkan sidang dengan agenda pembuktian tersebut.

Ia menekankan bagi setiap pihak, baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait yang lanjut ke sidang pembuktian, dapat mengajukan saksi maupun ahli sebanyak 6 orang untuk Pilgub dan 4 orang untuk Pilbup dan Pilwalkot.

"Bagi yang akan mengajukan saksi atau ahli, harus segera menyerahkan daftar identitas kepada mahkamah dan menjelaskan pokok-pokok apa yang akan disampaikan, supaya mahkamah lebih fokus mendalami kepada saksi itu," katanya.

Lebih lanjut, Saldi menjelaskan dalam sidang tahap pembuktian, majelis hakim akan mendengarkan keterangan saksi atau ahli serta menerima tambahan bukti.

Hanya Pilgub Bangka Belitung DiLanjut

Untuk level provinsi, any Provinsi Bangka Belitung dengan nomor putusan 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dinyatakan memasuki tahap pembuktian pada sengketa Pilgub, sementara sisanya tidak dapat dilanjutkan atau digugurkan oleh MK.

Adapun 8 sengketa Pilgub lain yang tidak berlanjut pada tahap persidangan berikutnya adalah Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi



Sidang Pleno gugatan Pilkada 2024 di Gedung 1 MK, Jakarta

Utara, Jawa Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah.

Pada Pilkada Provinsi Sumatera Utara, MK menolak gugatan sengketa Pilgub dan memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan berikutnya. Pasalnya dalil yang disampaikan dinyatakan tidak berkedudukan secara hukum.

Selain itu, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang membacakan pertimbangan Mahkamah menyatakan bahwa dalil Edy-Hasan yang merasa dirugikan karena bencana alam banjir dan longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara pada hari pencoblosan 27 November 2024. Menurut Guntur, KPU telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dengan melaksanakan pemungutan suara susulan (PSS) dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

"Terkait dengan partisipasi pemilihan tetap rendah, bahkan setelah dilaksanakan PSL dan PSS. Hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian termohon (KPU)," kata Guntur.

Sementara itu, sengketa Pilgub Jawa Tengah tidak berlanjut lantaran pasangan Andika-Hendy memutuskan untuk mencabut gugatan. MK pun mengabulkan permohonan pencabutan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tersebut. Ketetapan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan dismissal pada Selasa pagi, 4 Februari 2025.

"Mengabulkan penarikan kembali permohonan (gugatan) pemohon," imbuh Suhartoyo.

Selain itu, MK mengabulkan pencabutan gugatan untuk sengketa pilgub Sulawesi Utara. Sebelumnya,

Beberapa Gugatan Sengketa Pilkada yang Berlanjut Ke Tahap Pembuktian di Mahkamah Konstitusi :

- 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Empat Lawang
- 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pasaman Barat
- 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Bengkulu Selatan
- 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Serang
- 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Parigi Moutong
- 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Banggai
- 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Bungo
- 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 Provinsi Kep. Bangka Belitung
- 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Sabang
- 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Palopo
- 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pasaman
- 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Gorontalo Utara
- 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Lamandau
- 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Bangka Barat
- 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Banjarbaru
- 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pesawaran
- 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Magetan
- 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Aceh Timur
- 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Tasikmalaya
- 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mimika

pasangan Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw selaku pemohon gugatan telah mencabut gugatan mereka di MK. Permohonan penarikan kembali gugatan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum mereka, Denny Indrayana, saat sidang pemeriksaan pendahuluan di Panel I MK pada Senin, 13 Januari 2025 lalu. (win, wid rls, ant/dya)

Politikus Waswas Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari Jadi Masalah

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, waswas dengan rencana pemerintah melantik sejumlah kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025 nanti. Ia memperkirakan pelantikan kepala daerah yang tidak dilakukan secara serentak satu kali bisa menjadi masalah.

"Soal rencana pelantikan tanggal 20 Februari, bisa saja jadi persoalan di kemudian hari. Nanti kami yang disalahkan lagi," kata Doli Rabu, (5/2/2025).

Pelantikan serentak para kepala daerah terpilih yang menang pilkada pada 27 November 2024 terkendala oleh ratusan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 4-5 Februari 2025, MK mengadakan sidang putusan dismissal untuk menolak beberapa gugatan yang dinilai tidak layak karena tak memenuhi syarat.

Pada awalnya, para kepala daerah dijadwalkan dilantik pada 6

Februari 2025. Wakil Ketua MK Saldi Isra sempat mengusulkan agar kepala daerah yang gugatan sengketa pilkadanya tidak dilantik ikut dilantik pada tanggal tersebut. Namun karena pelantikan membutuhkan persiapan beberapa hari, maka pemerintah mengusulkan pelantikan kepala daerah nonsengketa digelar pada 20 Februari.

Doli sangsi dengan rencana pelantikan pada 20 Februari tanpa para kepala daerah yang sengketanya masih lanjut di MK. Ia sendiri berpendapat pelantikan cepat diperlukan demi jalannya pemerintahan di daerah. Tetapi, katanya, nasib para kepala daerah yang bersengketa di MK tidak bisa diabaikan.

"Kami buat serentak satu kali dengan pelantikan 300 (sekian) kepala daerah, tapi sisanya nanti tidak dilantik serentak. Kita lagi nanti yang disalahkan," kata dia.

MK awalnya telah selesai

menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Sidang Pembuktian untuk 310 perkara sejak 8-31 Januari 2025. Pada hari ini, 5 Februari, MK menyidangkan total 152 perkara PHPU Kepala Daerah.

Lalu pada Selasa kemarin, 4 Februari, MK bersidang untuk 158 perkara sengketa. Dari 158 perkara yang disidangkan, hanya ada 20 perkara yang diberikan kesempatan oleh MK untuk melanjutkan ke tahapan sidang berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi-saksi.

Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah sepakat tentang jadwal dan skema pelantikan. Kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK akan dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, pada Februari di tanggal yang belum ditentukan. Namun sebenarnya, pemerintah menghendaki tanggal 20 Februari. (wid, ant/dya)

Laka GT Ciawi Gegara Truk Rem Blong Lagi

Tewaskan 8 Orang, Kemenhub Janji Periksa Semua Pihak



Kondisi lokasi kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi 2, Tol Jagorawi, Bogor. (Ant)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, dalam keterangan ter-tulisnya, Rabu (5/2/2025).

Yani mengatakan, pihaknya juga akan melakukan inspeksi keselamatan sekaligus sosialisasi penerapan manajemen keselamatan pada setiap perusahaan yang mengangkut air minum yang beroperasi di lintasan Sukabumi-Jakarta.

"Kemudian kami juga akan terus melakukan pembinaan terhadap pengemudi melalui diklat pengemudi terutama terkait tata cara mengemudi yang benar serta tata cara pengecekan rem sebelum melakukan perjalanan," imbuh Yani.

Yani menekankan kepada seluruh perusahaan angkutan barang agar dapat memastikan kondisi pengemudi dan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum digunakan sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo menjelaskan bahwa

kecelakaan melibatkan truk muatan galon. Insiden bermula saat truk melaju dari arah Ciawi ke Jakarta menabrak sejumlah kendaraan yang sedang antri transaksi di pintu tol.

Sebelum menabrak kendaraan lain truk tersebut berjalan tidak stabil alias oleng ke kanan dan kiri. Tercatat enam unit kendaraan mengalami kerusakan dan tiga di antaranya terbakar dan sisanya ringsek. Selain truk, dua kendaraan lain yang terbakar merupakan mobil Avanza.

"Tiga kendaraan hancur terbakar, tiga kendaraan lainnya mengalami kerusakan," ujar Kombes Eko pada Rabu (5/2/2025).

Polisi mengonfirmasi bahwa delapan orang dinyatakan tewas dalam insiden itu. Lalu 11 orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit.

Semua korban dilarikan ke RSUD Ciawi. Saat ini baru korban luka-luka yang telah dievakuasi. Sementara korban tewas masih dilakukan identifikasi. Hanya saja polisi memastikan dari total korban tewas, 7 orang laki-laki dan 1 perempuan.

Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat saat ini sudah diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan maut tersebut.

"Tim TAA Korlantas dan Polda Jabar akan lebih memastikan, melakukan olah TKP pagi ini beserta dari Jasa Raharja," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Sementara itu, pengamat transportasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan negara gagal memberikan solusi terbaik menanggapi kecelakaan maut ini.

"Ini adalah kejadian yang selalu berulang, tidak pernah ada solusi dari negara," ungkap Djoko.

"Ini merupakan akumulasi dari carut-marut penyelenggaraan angkutan logistik di Indonesia. Yang bisa membereskan hanya menunggu ketegasan Presiden," lanjut akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

Menurut Djoko, banyak masalah yang harus diselesaikan langsung oleh Presiden supaya kecelakaan truk bisa ditekan jumlahnya. Mulai dari masalah penerapan aturan ODOL yang selalu ditunda, pengaturan upah standar minimum yang layak buat pengemudi truk, hingga masalah pungutan liar yang kerap dialami pengemudi truk di lapangan. (wid, ist, ant/dya)

JAKARTA- Kecelakaan beruntun yang menelan korban jiwa kembali terjadi pada Selasa (4/2/2025) tengah malam sekitar pukul 23.30 WIB. Kecelakaan maut tersebut kali ini terjadi di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Diduga insiden kecelakaan akibat rem tak berfungsi alias blong.

"Menyikapi kejadian ini, kita tengah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mengumpulkan data dan kronologis untuk tindak lanjut pembinaan dengan mengundang semua pihak terkait guna mengantisipasi kejadian berulang di masa mendatang," kata Plt.

Polisi Bekuk 2 Peracik Laboratorium 1 Ton Narkoba di Sentul

BOGOR-Polisi merilis kasus laboratorium atau clandestine laboratory narkotika di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (5/2/2025). Pengungkapan lokasi produksi barang haram ini merupakan yang pertama di tahun 2025 dan terbesar di wilayah Jawa Barat (Jabar).

Dirresnarkoba Polda Jabar, Kombes Pol Johannes R Manalu, mengatakan tempat itu adalah proses pembuatan bahan-bahan baku narkotika jenis tembakau sintetis.

"Yang cukup menarik bahwa penemuan kita ini adanya bahan yang sudah siap pakai ini modelnya seperti parfum," ujarnya.

Johanes menyebut, pelaku ini merupakan jaringan dari daerah Malang, Jawa Timur, dan Bali.

"Kami mengamankan dua orang pelaku yakni HP (34) dan AA (23). Totalnya ada empat pelaku, dua orang lagi masih DPO," ucapnya.

Kedua tersangka dijerat Pasal 113 ayat 2 dan/atau Pasal 114 ayat 2 dan/atau Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 103 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Keduanya terancam hukuman mati.

Kedua pelaku didapati sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat pabrik narkoba digerebek polisi. "Pada saat penggerebekan ini (kedua pelaku) sedang menggunakan sabu. Mereka dalam meracik, membuat, dan sebagainya tetap menggunakan sabu. Kami dapatkan bong (alat hisap sabu) dengan sisa-sisa plastik yang ada sisanya," katanya.

Dia mengatakan urine kedua pelaku berinisial HP dan AA dinyatakan positif mengandung zat sabu. HP dan AA berperan sebagai peracik tembakau sintetis di pabrik narkoba rumahan itu.

Dari kedua pelaku ini, polisi menyita barang bukti berupa 50 dus yang masing-masing berisi 20 bungkus kemasan tembakau murni dengan berat kemasan 1 kilogram.

Di mana keseluruhan tembakau tersebut sudah dituang di atas tarpal dan sudah dicampur dalam bahan bahan prekursor dan menghasilkan 1.000 kg atau 1 ton jenis tembakau

sintetis yang siap edar.

Selanjutnya, 125 botol spray ukuran 50 mm berisikan MDNB Inaka (narkoba), kemudian ada juga 20 jeriken berisi 282 liter cairan MDNB Inaka. Kemudian 479,6 gram serbuk MDNB Inaka atau biang sintetis, juga diamankan.

"Dua alat semprot ukuran 6 liter berisikan cairan mbmd inaka untuk menyemprot di dalam kolam," tutupnya.

"Barang bukti narkoba yang berhasil disita yaitu Rp 350 miliar. Jadi 1 gram peredarannya dihargai dengan harga Rp 350 ribu," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro.

Polisi minta masyarakat wasapada karena cairan narkoba tersebut dikemas pelaku menggunakan botol



Polisi merilis barang bukti dan 2 pelaku yang ditangkap dalam kasus laboratorium atau clandestine laboratory narkotika di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (5/2/2025). Ist

parfum.

"Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang siap edar, kita temukan juga biang cairan sintetis MBMB Inaca yang sudah dikemas dalam botol parfum," katanya.

Polisi mengatakan cairan tersebut dijual untuk disemprotkan pada batang rokok untuk menghasilkan efek seperti ganja. "Jadi itu rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya," ujarnya. (ant, din, rls/dya)

Tersandung Korupsi Batu Bara, KPK Sita 11 Mobil dari Rumah Ketua PP Japto

JAKARTA- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil usai menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS). Hal ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pihak KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu pagi dan saat ini kegiatan penyidikan tersebut telah rampung.

"Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2/2025) terkait perkara yang sama.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

KPK saat ini juga sedang menyidik



Penampakan rumah Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno di Jagakarsa. Ist

perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.

Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery

atau pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara.

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017. Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. (wid, rls, ant/dya)

Siapa Japto?

- Japto menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional PP sejak Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III di Cibubur pada 1981, dan terus memimpin organisasi itu hingga saat ini.
- Japto kembali terpilih menjadi Ketua PP pada Mubes terakhir pada Oktober 2019 di Jakarta.
- Pemuda Pancasila merupakan ormas kepemudaan yang berdiri sejak era Presiden RI pertama Sukarno pada 28 Oktober 1959.
- Organisasi ini didirikan mantan komandan militer legendaris Abdul Haris Nasution, untuk menghadapi ancaman komunis atau sebagai lawan tanding dari Pemuda Rakyat yang dibentuk Partai Komunis Indonesia (PKI).
- Kemudian di bawah Orde Baru, PP menjadi underbow Golongan Karya (Golkar). Meski begitu, Japto tak pernah bergabung dengan partai tersebut.
- Japto merupakan Ketua Umum Partai Patriot. Namun, kiprahnya tak terlihat di pemilu.
- Lalu pada Pilpres 2024 lalu, Japto masuk dalam jajaran Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, tim pemenang dari capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-CakImin).
- Pada Februari 2023, Japto juga terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PGI) periode 2023-2027. Dia dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2023 di Intercontinental Jakarta Pondok Indah, Selasa, 21 Februari 2023.



Resmi! Dana Transfer ke Daerah Dipotong 50%

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan peraturan khusus untuk memangkas anggaran transfer ke daerah pada tahun ini, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Peraturan itu berupa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. KMK 29/2025 ini Sri Mulyani tetapkan pada 3 Februari 2025.

Dalam diktum kesatu KMK 29/2025, penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan Sri Mulyani terdiri Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Otonomi Khusus;

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan Dana Desa.

Rincian anggaran yang dipangkas dalam KMK untuk masing-masing komponen TKD itu dimasukkan dalam bentuk cadangan. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman.

"Betul (masuk ke dalam bentuk cadangan)," kata Luky dikutip Rabu (5/2/2025).

Untuk pos TKD dalam bentuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil anggaran yang dipangkas senilai Rp 13,90 triliun, dari total pagu 2025 sesuai Perpres 201/2024 senilai Rp 27,08 triliun. Artinya, TKD dalam bentuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menjadi hanya sebesar Rp 13,90 triliun.

Sementara itu, untuk Dana Alokasi Umum atau DAU terpangkas sebesar

Rp 15,67 triliun dari pagu yang ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp 446,63 triliun, yang berarti total DAU keseluruhan pagunya menjadi Rp 430,95 triliun.

Adapun untuk pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terpangkas sebesar Rp 18,30 triliun dari pagunya pada tahun ini sebesar Rp 36,95 triliun. Dengan begitu, total DAK Fisik yang akan ditransfer ke daerah pada tahun ini hanya menjadi Rp 18,64 triliun.

Sementara itu, Dana Otonomi Khusus terkena pemangkas sebesar Rp 509,45 miliar dari pagu yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 14,51 triliun. Dana otsus khusus untuk Papua hanya menjadi Rp 9,69 triliun dari sebelumnya Rp 10,04 triliun dan dana otsus Aceh hanya menjadi Rp 4,39 triliun dari semula Rp 4,46 triliun.

Dana Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta pun terpangkas sebesar Rp 200 miliar untuk pos cadangan, dari pagunya semula sebesar Rp 1,2 triliun. Dengan begitu, dana keistimewaan yang akan ditransfer pemerintah ke DIY hanya menjadi sebesar Rp 1 juta.

Terakhir, untuk Dana Desa, pemangkasannya ialah sebesar Rp 2 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Maka, Dana Desa yang nantinya ditransfer ke kabupaten/kota dari APBN menjadi hanya sebesar Rp 69 triliun.

Seluruh dana TKD yang dipangkas per komponen itu akan dimasukkan pemerintah untuk mendanai kebutuhan prioritas yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis. Ini sebagaimana tertuang dalam diktum kedelapan KMK 29/2025. (ant, rls, wid/dya)

Opsen Pajak Kendaraan Ditarget Rp 184 M, Bapenda Kota Lirik Potensi Mahasiswa Luar Kota

MALANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menargetkan pendapatan sebesar Rp 184 miliar dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2025.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Bapenda juga mewacanakan regulasi yang mengatur balik nama kendaraan mahasiswa luar kota agar pajaknya masuk ke Kota Malang. Langkah ini akan dikaji lebih lanjut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan DPRD Kota Malang.

"Target di tahun 2025 ini Rp 184 miliar, sudah tercapai di Januari Rp 13,4 miliar," ujar Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, Rabu (5/2/2025)

Handi merinci, sepanjang Januari 2025, pihaknya telah mengumpulkan Rp 13,4 miliar, yakni opsen PKB yang masuk mencapai Rp 9,4 miliar, sedangkan dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp 4 miliar. Menurutnya, hal ini tentu dapat menjadi tambahan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar bagi Kota Malang.

Ditambahkannya, penerapan

opsen PKB dan BBNKB ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mulai diberlakukan pada 2025 ini. Dengan aturan baru tersebut, 66 persen pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat akan masuk ke kas daerah, sementara 34 persen disetorkan ke kas provinsi setiap harinya.

"Sebelumnya, pembagian pajak kendaraan 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk daerah, tetapi sifatnya proporsional. Dengan aturan baru ini, porsi untuk daerah meningkat, potensi ini yang harus dimanfaatkan dengan benar," kata Handi.

Dalam kesempatannya ini, Handi juga menekankan pentingnya peran masyarakat, terutama Ketua RT dan RW, dalam mengingatkan warganya agar taat membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

"Sebanyak 66 persen ini kan masuk ke kas daerah, nah dari situ bisa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah disepakati dalam Musrenbang,

kemudian untuk kesejahteraan masyarakat juga," tegasnya.

Selain mengandalkan opsen PKB, Bapenda juga tengah menggali potensi pajak kendaraan dari mahasiswa luar kota yang menempuh pendidikan di Malang. Handi menyoroti banyak mahasiswa yang masih menggunakan kendaraan dengan pelat nomor luar daerah, sehingga pajaknya tidak masuk ke Kota Malang.

"Kami akan melakukan pendataan dan sosialisasi agar mahasiswa yang menetap di Malang dalam jangka waktu lama dapat melakukan balik nama kendaraannya ke N Kota Malang. Dengan demikian, pajaknya bisa dikelola oleh daerah," ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal ini, Bapenda berencana berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi, kepala daerah terpilih, serta DPRD Kota



Operasi penertiban pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Malang. (dok. Samsat Kota Malang)

Malang. Handi mengakui upaya ini memerlukan regulasi yang tepat, meskipun ia belum memastikan apakah kebijakan tersebut akan berbentuk Peraturan Daerah (Perda).

"Ya karena itu potensi besar. Tidak harus Perda sebenarnya, tapi nanti lah bagaimana dipikirkan bentuknya. Tapi upaya untuk menggali potensi itu ada," pungkasnya. (Santi/Dya)

'Kota Batu Mantu' Memudahkan Legalitas Pernikahan hingga Penetapan Asal Usul Anak



Masyarakat yang memanfaatkan program "Kota Batu Mantu" di Balai Kota Among Tani, Rabu (5/2/2025). (dok. Prokopim Kota Batu)

pembuatan biodata.

"Hari ini ada 13 perkara isbat nikah, 44 perkara penetapan asal-usul anak, dan 26 perkara pembetulan biodata. Ini juga jadi komitmen kami dalam hal pelayanan publik," ujar Sekretaris Daerah Kota Batu, Zadim Efisiensi, Rabu (5/2/225).

Menurut Zadim, melalui sinergi bersama Kemenag Kota Batu, Baznas, Dispendukcapil, dan OPD terkait, dengan program ini masyarakat

tidak hanya mendapatkan kepastian hukum. Tetapi juga semakin sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

"Menariknya, seluruh proses dalam program "Batu Mantu" ini dibiayai oleh Pemkot Batu dan Baznas Kota Batu, sehingga masyarakat tidak dikenakan biaya alias gratis," katanya.

Lebih lanjut, Zadim juga

mengklaim sidang terpadu ini menjadi program terbesar di Kota Batu dalam hal jumlah peserta dan cakupan layanan yang diberikan. Melalui sinergi antarinstansi, program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam administrasi kependudukan dan legalitas pernikahan.

"Ke depan, Pemkot Batu bersama instansi terkait berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan hukum yang lebih responsif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulidah, menekankan pentingnya program ini dalam menjamin hak-hak hukum masyarakat. Menurutnya, isbat nikah merupakan proses hukum yang diperlukan bagi pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dengan adanya putusan pengadilan, pasangan tersebut dapat memperoleh akta nikah yang sah di mata hukum.

"Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menangani perkara perkawinan. Yang istimewa dari kegiatan ini adalah cakupannya yang luas, dengan jumlah perkara yang cukup besar dibandingkan program serupa sebelumnya," jelas Nurul.

Nurul juga menyoroti tingginya perkara penetapan asal-usul anak dalam sidang kali ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya pencatatan hukum dalam pernikahan.

"Tingginya perkara asal-usul anak mencerminkan kesadaran hukum yang lebih baik di Kota Batu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami risiko pernikahan siri, terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut," tambahnya.

Selain itu, ia menjelaskan pembetulan biodata juga harus melalui prosedur hukum yang benar. Perubahan pada dokumen seperti buku nikah, misalnya, tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa melalui penetapan dari Pengadilan Agama. (Santi/Dya)

Penembakan Massal Terkelam di Swedia 11 Tewas di Pusat Pendidikan Orebro



Sejumlah petugas kepolisian berjaga setelah serangan penembakan mematikan di Kampus Risbergska, Orebro, Swedia, Selasa (4/2/2025).
Foto: Kicks Nilsson/ TT News Agency via Reuters

OREBRO - Sebelas orang tewas dalam penembakan di pusat pendidikan orang dewasa di Orebro, Swedia, pada Selasa (4/2/2024). Tragedi ini menjadi serangan senjata paling mematikan dalam sejarah negara itu.

Pelaku diyakini termasuk di antara korban tewas diduga bunuh diri, menurut pihak kepolisian setempat dan masih menyelidiki kemungkinan adanya korban tambahan. Motif serangan belum diketahui.

"Saat ini, ada 11 kematian akibat insiden tersebut. Jumlah yang terluka masih belum jelas. Saat ini kami tidak memiliki informasi tentang kondisi mereka yang terluka," kata Kepala Polisi Orebro, Roberto Eid Forest, dalam konferensi pers.

Forest juga mengungkap alasannya tak dapat memberikan informasi lebih rinci lantaran tingkat insiden yang sangat besar.

Namun, ia memastikan pelaku

bertindak sendiri dan sejauh ini tidak ada indikasi terorisme. Pelaku tidak memiliki catatan sebelumnya, jadi dia tidak dikenal oleh polisi, menurut harian Swedia Aftonbladet melaporkan.

Dalam konferensi pers, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyebut insiden ini sebagai "penembakan massal terburuk" dalam sejarah Swedia.

Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi sebelum hasil penyelidikan diumumkan.

Diketahui penembakan terjadi di Sekolah Risbergska, sekitar 200 km dari Stockholm. Sekolah ini melayani orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan atau mengejar kualifikasi akademik.

Penembakan terjadi sekitar pukul 12.33 siang waktu setempat, yang menargetkan pusat pendidikan orang dewasa yang terletak di kampus

bersama sekolah-sekolah lain.

Seorang guru di sekolah itu, Maria Pegado, sedang berada di kelas saat serangan terjadi.

"Seseorang membuka pintu dan berteriak agar semua orang keluar. Saya membawa murid-murid ke lorong, lalu kami mulai berlari," katanya kepada Reuters.

Beberapa siswa dan guru berlindung di dalam kelas. Miriam Jarvall dan Patrik Soderman, dua guru di sekolah tersebut, mendengar tembakan di lorong.

"Awalnya ada banyak tembakan, lalu hening selama setengah jam, kemudian terdengar lagi. Kami bersembunyi di bawah meja," ujar mereka kepada surat kabar Dagens Nyheter.

Sementara itu polisi masih melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan menggeledah beberapa tempat di Orebro, termasuk kediaman tersangka.

Hingga Selasa malam, aparat masih berjaga di luar sebuah apartemen yang digeledah sebelumnya.

"Kami melihat banyak polisi bersenjata," kata seorang warga yang tinggal di gedung itu, Lingam Tuohmaki.

Identitas dan latar belakang pelaku belum diungkap. Beberapa laporan menyebut pelaku berusia sekitar 35 tahun, memiliki izin senjata, dan tidak memiliki catatan kriminal. Namun, polisi belum mengonfirmasi

informasi tersebut.

Kristersson mengatakan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.

"Akan tiba waktunya kita mengetahui bagaimana ini bisa terjadi dan apa motif di baliknya," katanya.

Kekerasan Senjata Meningkat

Swedia memiliki tingkat kepemilikan senjata yang tinggi, terutama untuk berburu, namun kekerasan senjata meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat konflik geng kriminal.

Sebenarnya serangan di sekolah jarang terjadi, tetapi negara ini pernah mengalami beberapa insiden kekerasan di lingkungan pendidikan.

Pada 2015, seorang pria bersenjata pedang membunuh seorang guru dan seorang siswa di Trollhattan dalam serangan bermotif rasis.

Pada 2022, seorang siswa menikam dua guru hingga tewas di Malmo.

Meski begitu, penembakan di Orebro menjadi yang paling mematikan dalam sejarah Swedia.

Raja Swedia Carl XVI Gustaf hingga Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan belasungkawa.

"Kekerasan dan teror seperti ini tidak memiliki tempat di masyarakat kita," tulis von der Leyen di media sosial. (Reuters,ist/nei)



Bunga dan lilin diletakkan di dekat sekolah Risbergska, setelah serangan penembakan mematikan di pusat pendidikan orang dewasa di Orebro, Swedia, 5 Februari 2025. REUTERS

Kenali Asam Urat di Kepala Apa Penyebabnya?

ASAM URAT sering kali dikaitkan dengan nyeri sendi pada kaki dan tangan. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa asam urat juga ternyata dapat memengaruhi bagian tubuh lain, termasuk kepala. Meski jarang disadari, asam urat di kepala dapat menimbulkan gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini bisa semakin parah dan mempengaruhi kualitas hidup penderitanya.

Asam urat di kepala biasanya tidak terjadi secara langsung, karena asam urat lebih sering terkait dengan sendi dan persendian. Namun, beberapa kondisi yang terkait dengan asam urat dapat menyebabkan gejala di kepala.

Menurut para ahli, asam urat terjadi akibat tingginya kadar purin dalam tubuh, yang kemudian membentuk kristal dan mengendap di persendian.

Saat kristal ini terbentuk di area kepala atau leher, gejala seperti sakit kepala intens dan tekanan di kepala bisa muncul. Sayangnya, banyak orang mengira gejala ini hanya migrain biasa, sehingga terlambat mendapatkan penanganan.

Lantas, apa saja tanda-tanda asam urat di kepala yang perlu diwaspadai? Berikut penjelasannya

a berdasarkan berbagai sumber medis.

Ciri-ciri Asam Urat di Kepala

Asam urat di kepala dapat menimbulkan beberapa gejala yang mirip dengan kondisi medis lainnya, seperti migrain atau sakit kepala tegang. Namun, ada beberapa ciri khas yang bisa menjadi indikator awal:

Sakit kepala

intens dan berdenyut: Rasa nyeri ini biasanya muncul secara tiba-tiba dan terasa seperti migrain yang menyerang satu sisi kepala.

Nyeri pada leher dan bahu

Penumpukan kristal asam urat di sendi leher bisa menyebabkan ketegangan dan nyeri yang menjalar hingga bahu.

Sensasi tekanan di kepala: Penderita kerap

merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menekan bagian dalam kepala, membuat mereka sulit berkonsentrasi. Sensitivitas terhadap cahaya dan suara: Sama seperti migrain, penderita asam urat di kepala bisa mengalami ketidaknyamanan saat terpapar cahaya terang dan suara keras.

Mual dan muntah

Saat sakit kepala mencapai puncaknya, beberapa penderita mengalami mual bahkan muntah akibat rasa nyeri yang hebat.

Penyebab Asam Urat Menyerang Kepala

Penyebab utama asam urat adalah kadar purin yang berlebihan dalam tubuh, yang kemudian membentuk kristal di persendian. Beberapa faktor pemicu tingginya kadar asam urat meliputi:

Pola makan tinggi purin

Konsumsi makanan seperti daging merah, makanan laut, alkohol, dan jeroan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah.

Obesitas

Kelebihan berat badan dapat meningkatkan produksi asam urat dan memperlambat ekskresi melalui ginjal.

Riwayat keluarga

Faktor genetik berperan besar dalam menentukan risiko seseorang mengalami asam urat.

Komplikasi penyakit lain

Diabetes, hipertensi, atau gangguan ginjal dapat memperburuk kondisi asam urat.

Cara Mendiagnosis Asam Urat di Kepala

Banyak orang yang mengabaikan gejala awal asam urat karena dianggap sebagai sakit kepala biasa. Padahal, diagnosis dini dapat membantu mencegah kondisi yang lebih serius.

Berikut beberapa cara untuk mendeteksi asam urat di kepala:

Tes kadar asam urat dalam darah Pemeriksaan laboratorium dapat mengukur kadar asam urat untuk mengetahui apakah berada di ambang batas normal.

Pemeriksaan pencitraan: CT scan atau MRI dapat membantu melihat apakah terdapat penumpukan kristal di sekitar kepala dan leher.

Analisis cairan sendi Jika terjadi nyeri sendi bersamaan dengan sakit kepala, dokter bisa melakukan pemeriksaan cairan sendi untuk mendeteksi keberadaan kristal asam urat.

Langkah-Langkah Mengatasi Asam Urat di Kepala

Jika sudah didiagnosis mengalami asam urat di kepala, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasinya:

Perubahan pola makan

Mengurangi konsumsi makanan tinggi purin dan menggantinya dengan sayuran, biji-bijian, serta produk susu rendah lemak.

Menjaga hidrasi tubuh

Minum air yang cukup membantu mengeluarkan asam urat melalui urin dan mencegah pembentukan kristal.

Menggunakan obat-obatan

Obat seperti allopurinol atau colchicine bisa digunakan untuk menurunkan kadar asam urat, tetapi harus sesuai dengan resep dokter.

Terapi kompres

Kompres hangat atau dingin dapat membantu meredakan nyeri kepala akibat peradangan.

Olahraga ringan

Aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau yoga dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil.

Pencegahan Agar Asam Urat Tidak Menyerang Kepala

Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah asam urat di kepala: Menghindari makanan tinggi purin: Mengurangi konsumsi daging merah, alkohol, dan seafood bisa membantu menurunkan risiko asam urat. (nei,ist/dya)



PT Pupuk Kujang Mulai Produksi Amonia Hijau, Gantikan Batu Bara



PT Pupuk Kujang. (PT Pupuk Kujang)

PERUSAHAAN PT Pupuk Kujang Cikampek memulai uji coba produksi green ammonia, suatu teknologi yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada batu bara sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik.

“Green ammonia adalah ammonia yang paling bersih, tidak menghasilkan karbon secara langsung saat dibakar. Bahan bakunya adalah green hydrogen, tanpa bahan bakar fosil,” kata Direktur Operasi dan Produksi Pupuk Kujang Robert Sarjaka dalam siaran pers yang diterima Tempo, Selasa, 4 Februari 2025.

Robert mengklaim Pupuk Kujang menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia di Jawa Barat yang pertama kali membuat ammonia hijau di Indonesia. Ia meresmikan produksi

pertama ammonia hijau Pupuk Kujang di area pabrik Ammonia 1B di kompleks Pupuk Kujang Cikampek, Selasa.

Robert mengatakan Pupuk Kujang sebagai pemain lama di industri ammonia memiliki fasilitas lengkap dalam memproduksi ammonia. Fasilitas tersebut yang digunakan untuk memproduksi ammonia hijau.

Pada uji coba produksi tersebut, Pupuk Kujang menggandeng PLN Indonesia Power (PLN IP) yang akan memasok hidrogen hijau sebagai bahan baku pembuatan ammonia hijau. Pada produksi awal, Pupuk Kujang akan mengolah 1 ton hidrogen hijau menjadi 5 ton ammonia hijau.

“Kami akan memenuhi kebutuhan PLN IP yang membutuhkan 50 ton green ammonia untuk menyalakan turbin di PLTU Labuan,” kata Robert.

Ammonia hijau produksi Pupuk Kujang tersebut rencananya akan memasok PLTU yang dikelola PLN IP. Ammonia hijau tersebut akan digunakan dalam proses co-firing, yakni proses pembakaran di boiler atau tungku khusus untuk menghasilkan tenaga uap untuk memutar turbin pembangkit listrik di PLTU. Ammonia hijau tersebut diproyeksikan untuk mengganti sebagian penggunaan batu bara pada PLTU.

“Karena berbagai keunggulan itu, uji coba produksi green ammonia ini merupakan sebuah langkah nyata menjalankan upaya Indonesia dalam mengurangi emisi CO2 sesuai dengan target nasional mencapai netralitas karbon tahun 2060,” kata Robert.

Vice President Pengembangan PT Pupuk Kujang Iswahyudi Mertosono

mengklaim proses produksi yang dilakukan tersebut yang pertama di Indonesia. “Injeksi green hydrogen dalam pabrik ammonia existing untuk memproduksi hybrid ammonia ini merupakan proses yang pertama kali di dunia dan dalam merancang proses ini memerlukan modifikasi perpipaan dan evaluasi risiko dan teknis yang tidak sederhana. Alhamdulillah hari ini kita bisa saksikan bahwa hal ini bisa kita wujudkan,” kata dia, dalam siaran pers tersebut.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Bernardus Sudarmanta mengatakan ammonia hijau produksi Pupuk Kujang tersebut akan diuji coba di PLTU Labuan, Banten.

“Uji coba ini untuk mendapatkan keyakinan bahwa PLTU juga bisa beroperasi menggunakan ammonia. Apakah lebih efisien dan mudah di-handle, karena itu kami harap uji coba ini dilakukan dengan sangat baik dan akurat,” kata dia, dalam siaran pers tersebut.

Vice President Technology Development PLN Indonesia Power Hedwig Lunga Sampe Pajung mengatakan ammonia hijau tersebut akan digunakan dalam proses co-firing selama 8 jam di PLTU Labuan. “Kalau berbagai parameternya aman, dan uji cobanya memuaskan, bukan tidak mungkin kami menuju ke tahap penghitungan efisiensinya,” kata dia.

PLTU Labuan akan menggandeng IHI Corporation, perusahaan energi asal Jepang, untuk mengevaluasi secara teknis penggunaan ammonia hijau tersebut, khususnya terkait modifikasi alat pembakar untuk menggerakkan turbin listrik pembangkit. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Viral Kulit Pisang Bisa Gantikan Botox? Ini Kata Pakar

TIKTOK kembali menjadi sumber inspirasi tren kecantikan yang tidak biasa, kali ini dengan menggunakan kulit pisang sebagai masker wajah.

Konon, metode ini bisa mencerahkan, menenangkan kulit, bahkan disebut-sebut sebagai 'Botox alami.' Triknya cukup sederhana: kulit pisang digosokkan ke wajah selama beberapa menit setiap hari. Beberapa pengguna TikTok mengklaim bahwa wajah mereka terasa lebih kencang setelah mencobanya. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka lebih memilih scrub kulit pisang dibandingkan suntik Botox karena hasilnya dianggap mirip.

Dr. Dave Reilly, kepala ilmuwan di Absolute Collagen

Menurut Dr. Dave Reilly, kepala ilmuwan di Absolute Collagen, tren ini muncul karena adanya klaim bahwa kulit pisang mengandung lutein-sejenis antioksidan yang dipercaya dapat membantu mencerahkan kulit dan mengurangi garis halus serta kerutan. Beberapa orang juga menganggap kulit pisang bisa berfungsi sebagai eksfoliator alami.

Namun, Dr. Dave justru skeptis terhadap manfaatnya untuk kecantikan kulit. "Memang benar kulit pisang mengandung antioksidan, tetapi zat ini tidak akan terserap secara efektif saat diaplikasikan langsung ke kulit," jelasnya, seperti dikutip pada Rabu (5/2/2025).

Selain itu, kadar lutein dalam kulit pisang juga tidak cukup tinggi untuk memberikan hasil yang signifikan. Para dokter kulit pun membantah klaim bahwa kulit pisang bisa menggantikan Botox.

"Tidak ada produk topikal atau suplemen makanan yang bisa memberikan efek seperti Botox yang disuntikkan langsung ke dalam otot," ujar Dr. Geeta Yadav, seorang dermatologis dari Toronto.

Dia lebih merekomendasikan produk skincare yang sudah terbukti secara ilmiah dibandingkan metode DIY seperti ini. Menggosokkan kulit pisang ke wajah juga bisa memicu reaksi bagi yang memiliki kulit sensitif.

Risiko terparahnya, kulit bisa merah-merah hingga iritasi jika memiliki alergi pisang. "Sebaiknya tetap berpegang pada rutinitas skincare yang terpercaya dan menghindari 'hack' yang berpotensi menyebabkan iritasi,"

kata Dr. Dave.

Meskipun manfaatnya untuk wajah masih diragukan, kulit pisang tetap bisa digunakan untuk hal lain. Seperti meredakan gigitan serangga hingga membantu mencerahkan kulit yang menghitam di sekitar siku atau lutut.

Dr Taylor Bullock MD Pakar Dermatologi

Apakah Benar Kulit Pisang Bisa Mengatasi Keriput di Wajah bak Botox? "Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa menggosok kulit pisang ke wajah Anda akan memberikan manfaat," kata Dr. Taylor Bullock dikutip pada Rabu (5/2/2025).

Dr. Bullock mengatakan, pisang memang kaya akan antioksidan. Bahkan sebuah studi pada 2011 menemukan bahwa kulit pisang, memiliki kadar antioksidan yang tinggi. Kulit pisang yang belum matang mengandung lebih banyak antioksidan dibandingkan kulit pisang yang matang atau terlalu matang.

"Antioksidan adalah zat alami yang sangat baik untuk tubuh, termasuk kulit, dan merupakan tambahan yang bagus untuk rutinitas skincare," ujarnya.

Namun menurut Dr. Bullock tidak serta-merta kamu bisa mendapatkannya hanya dari kulit pisang. Termasuk kulit pisang yang sudah sangat matang.

"Secara teori, kamu mungkin mendapatkan sedikit antioksidan dengan menggosok kulit pisang pada kulit wajah kamu. Tetapi jika tujuan kamu adalah

memiliki rutinitas skincare yang kaya antioksidan, jauh lebih baik jika kamu menggunakan produk perawatan kulit yang kaya akan antioksidan langsung pada wajah," jelas Dr. Bullock.

Alasan lainnya kulit pisang tidak bisa bekerja bak Botox karena cara kerjanya yang berbeda. Botox disuntikkan di bawah kulit untuk menargetkan aktivitas otot yang menyebabkan kerutan. Menggosok kulit pisang pada permukaan kulit tidak akan menembus hingga ke bawah untuk merelaksasi otot penyebab kerutan.

Selain itu nutrisi dalam kulit pisang hanya sedikit yang benar-benar dapat menembus kulit cukup dalam untuk memberikan perbedaan signifikan terhadap kerutan, kecerahan, atau warna kulit. Tekstur kulit pisang yang terlalu lembut juga tidak bisa untuk mengangkat sel kulit mati seperti eksfolian sebenarnya.

Risiko Menggosok Kulit Pisang pada Wajah

Bagi sebagian orang, rutin menggosok kulit pisang ke wajah tidak akan menyebabkan masalah atau reaksi yang signifikan. Namun, jika kamu memiliki kulit sensitif, mungkin berpotensi mengalami masalah misalnya iritasi atau kemerahan, jerawat hingga reaksi alergi.

Mitos dan Realitas tentang Perawatan Kulit dengan Kulit Pisang

Bullock, mengatakan, meskipun menggoda untuk percaya pada manfaat perawatan kulit yang murah

dan mudah seperti kulit pisang, manfaatnya sebenarnya sangat minim.

"Jika Anda mencari antioksidan, pilihlah produk yang diformulasikan khusus untuk memberikan manfaat bagi kulit Anda," katanya sambil merekomendasikan beberapa sumber antioksidan alami atau mencari serum dan produk lain yang mencantumkan bahan-bahannya, seperti:

1. Minyak Argan

Biasa digunakan pada kulit dan rambut, minyak alami ini diekstraksi dari biji pohon argan di Maroko. "Minyak argan juga memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat membantu menyeimbangkan produksi minyak kulit," kata Bullock.

2. Minyak Jojoba

Minyak alami ini, yang juga memiliki efek anti-inflamasi, berasal dari semak yang tumbuh di Amerika Serikat bagian barat daya dan Meksiko bagian utara. Minyak jojoba dapat meniru minyak alami kulit, membantu menjaga keseimbangannya. (nei,ist/dya)



DPR Keablasan! ... (dari Hal 1)

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimli Asshiddiqie menilai DPR sudah keablasan dengan merevisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Kewenangan DPR dinilai jauh melampaui batas.

"Keterlibatan DPR sekarang sudah keablasan dengan menafsirkan seakan fit and proper test dan lain-lain itu variasi dari fungsi pengawasan. Sekarang sudah lebih dari 300-an pejabat yang mesti diseleksi dan dipilih di DPR," tegas Jimly, Rabu (5/2/2025).

Menurut dia, aturan baru ini hanya membuat lembaga yang pejabatnya dipilih DPR semakin tidak independen. Dengan begitu, politisasi pada lembaga-lembaga pemerintahan bakal kian kentara.

"Yang lebih buruk lagi adalah semua lembaga publik yang mestinya independen terus mengalami politisasi," tuturnya.

Jimly menuturkan sebaiknya keterlibatan DPR dalam memilih dan rekrutmen pejabat publik dievaluasi total. Ia menilai DPR cukup menjalankan tugas utamanya yaitu legislasi, anggaran, serta pengawasan. Jimly juga menilai kebijakan ini juga mengancam demokrasi.

Senada, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna menekankan, aturan tatib DPR yang bisa mengevaluasi pejabat lintas kementerian sudah melampaui kewenangan. Ia mengaku tidak paham dengan sikap DPR.

"Cukup mahasiswa hukum semester tiga yang jawab pertanyaan ini. Dari mana ilmunya ada tatib bisa mengikat keluar? Masa DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum," kata Palguna kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

"Masa DPR tak mengerti teori kewenangan? Masa DPR tidak mengerti teori pemisahan kekuasaan dan check and balances?" tutur dia,

Eks Hakim MK ini menduga, tatib sengaja diubah hingga bisa mengintervensi pejabat publik lintas kementerian karena DPR mempunyai kepentingan tertentu.

Ia menilai, sikap seperti ini tidak bisa dibenarkan karena bisa berdampak terhadap Indonesia sebagai negara hukum.

"Atau, jika mereka mengerti tetapi tetap juga melakukan, berarti mereka tidak mau negeri ini tegak di atas hukum dasar (UUD 1945) tetapi di atas hukum yang mereka suka dan mau dan mengamankan kepentingannya sendiri," ucap Palguna. "Rusak negara ini bos," tutup dia.

Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW), turut menyoroti polemik ini. BW mengaku heran dengan kebijakan baru ini.

"Kok tiba-tiba tata tertib DPR bisa men-delegitimasi atau mempersoalkan orang-orang yang pernah dipilih di rapat paripurna DPR," kata BW di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Ia menilai, kebijakan baru ini hanyalah sebuah taktik untuk men-delegitimasi seseorang sebagai pejabat negara.

"Semua pejabat negara yang dipilih oleh DPR itu bisa dipersoalkan lagi dengan proses evaluasi. Kok bisa ya? Itu taktik dipakai untuk men-delegitimasi siapa pun posisi khusus pejabat negara," ungkapnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengatakan, revisi tatib DPR ini menjadi bukti jika Parlemen tidak paham terkait peraturan perundang-undangan.

"Ada berbagai kelemahan mendasar dari apa yang dilakukan DPR dan terlihat tidak paham apa pun soal peraturan perundang-undangan," kata Feri.

Feri menyoroti 3 hal terkait revisi tatib DPR ini. Ia menilai, DPR telah melampaui kewenangannya karena bisa ikut campur mengatur lembaga lain.

"Pertama mengoreksi lembaga negara lain terutama memberhentikan pejabatnya itu bukan tugas DPR, bukan kewenangannya. Dia sudah campur wilayah terlalu jauh di kekuasaan negara lain," ucap Feri.

Dosen Universitas Andalas ini menekankan, kedua DPR tidak paham perundang-undangan. Ia heran mengapa peraturan tatib lebih kuat dibanding bunyi Undang-undang.

"Tatib kok bisa mengubah UUD dan bunyi UU? Jadi aneh sekali terjadi pelanggaran sehingga itu tidak sah sebenarnya," kata Feri.

Sedangkan ketiga, Feri menyebut seharusnya tatib DPR berlaku untuk internal, bukan untuk mengintervensi lembaga lain. Ia menduga revisi tatib yang melampaui kewenangan DPR bertujuan untuk menekan Mahkamah Konstitusi.

"Ketiga itu peraturan tatib apa pengaruhnya? Harusnya lebih banyak ke urusan internal DPR, namanya saja tatib DPR," kata Feri.

"Bagi saya ini sangat janggal motifnya mungkin dalam rangka menekan lembaga tertentu terutama MK dan itu cara permainan politik paling tidak sehat yang pernah dilakukan DPR saat ini," tutur dia.

Berkukuh Jalankan Fungsi Pengawasan

DPK mengesahkan tatib baru yang salah satunya memberi

wewenang mengevaluasi pejabat hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Bahkan, evaluasi bisa sampai rekomendasi pemberhentian yang harus dipatuhi Presiden.

Revisi tersebut mengatur penyisipan Pasal 228A ayat (1) dan (2) di antara Pasal 228 dan Pasal 229.

Pasal 228A ayat (1) berbunyi; Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

Sementara itu, Pasal 228A ayat (2) berbunyi: Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan penambahan pasal baru tersebut, DPR dapat secara berkala mengevaluasi setiap pejabat yang mereka tetapkan dan bersifat mengikat.

Dengan begitu, hakim konstitusi yang ditetapkan dalam rapat paripurna usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan, juga akan dapat dievaluasi oleh DPR. Selain hakim MK, pejabat publik lainnya yang juga ditetapkan DPR ialah pimpinan KPK.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, revisi tatib ini untuk mengevaluasi secara berkala para pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna melalui fit and proper test.

"Ya, saya pikirkan itu cuma penegasan saja dari fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada," kata Dasco. Revisi ini merupakan inisiatif DPR.

"Misalnya, ada (pejabat) suatu lembaga yang pensiun misalnya umurnya sampai 70 tahun dan dia di situ sudah menjabat selama 25 tahun dan sekarang kondisinya misalnya sakit-sakitan. Nah, ini kan kemudian kita harus melakukan fit and proper kepada yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik," tuturnya.

Dengan demikian, lanjut Dasco, DPR RI dapat merekomendasikan ulang uji kelayakan dan kepatutan untuk diisi dengan calon pejabat lainnya dalam formasi tersebut.

"Kami harus kemudian melakukan mekanisme agar yang bersangkutan menggantikan oleh yang lebih layak dalam menjalankan tugas-tugas negara," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pasal ini membuka kemungkinan DPR bakal memiliki kewenangan untuk mencopot pejabat negara, Dasco

menjawab diplomatis.

"Kita belum bicara sejauh itu. Yang kita lihat misalnya ada satu lembaga yang pensiun misalnya umurnya sampai 70 tahun, dan dia di situ sudah menjabat selama 25 tahun, dan sekarang kondisinya misalnya sakit-sakitan," kata Dasco. (wid, din, rls, ist, ant/dya)

Pejabat Publik yang Dipilih DPR

- KPK: Pimpinan KPK termasuk Dewan Pengawas KPK
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Komisi Yudisial (KY)
- Mahkamah Agung (MA)
- Hakim Agung
- Mahkamah Konstitusi (MK): Namun perlu menjadi catatan karena tidak seluruh hakim MK dipilih melalui DPR, karena ada hakim MK yang merupakan unsur dari Presiden dan unsur MA. Total ada 3 hakim MK yang merupakan unsur DPR.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Gubernur BI
- Hakim Agung
- Panglima TNI
- Kepala Staf Angkatan (TNI AD, AL dan AU)
- Kepala BIN
- Kapolri
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Geger Donald Trump Mau Ambil Alih Gaza

WASHINGTON-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengambil alih Gaza. Dia kemudian menginginkan memindahkan seluruh warga Palestina di sana.

"AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana," kata Trump kepada wartawan dikutip Rabu (5/2/2025).

Pernyataan itu disampaikan Trump usai bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington.

"Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi itu," sambung Trump.

Trump menambahkan di masa depan, AS akan membangun perekonomian di wilayah milik Palestina yang hancur akibat serbuan Israel selama 15 bulan.

"Jika perlu, kami akan melakukannya, kami akan mengambil alih bagian itu, kami akan mengembangkannya, menciptakan ribuan dan ribuan lapangan kerja, dan itu akan menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah," tambah Trump.

Netanyahu yang berkomentar sesuai koleganya itu menyebut, komentar AS akan mengambil alih Gaza sebagai ide out of the box dan ide segar.

"Ini menunjukkan kemauan untuk menghancurkan pemikiran konvensional," papar Netanyahu.

Banjir Penolakan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas tegas menolak rencana tersebut. "Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina keluar dari tanah air mereka," kata kantor Abbas dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari AFP.

"Hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan," sambung dia.

Saat ini hampir sebagian besar wilayah Gaza rata dengan tanah imbas serangan Israel di sana. Lebih dari 46 ribu orang tewas akibat serangan Israel.

Hamas, yang diperangi Israel di Gaza, turut menyampaikan penolakan terhadap ide Trump. Penguasa Gaza itu memandang proposal Trump sebagai ide rasis.

"Sikap rasis Amerika sejalan dengan posisi sayap kanan ekstrem Israel dalam mengusir rakyat kami dan menghilangkan tujuan kami," kata juru bicara Hamas Abdel Latif al-Qanou.



Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berbicara dalam konferensi pers di Ruang Timur Gedung Putih, di Washington. (AFP/ist)

Indonesia juga menegaskan penolakannya terhadap segala upaya pemindahan paksa warga Palestina atau perubahan komposisi demografis di Wilayah Pendudukan Palestina

"Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam unggahan di X.

Indonesia pun menyerukan

komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri dan kembali ke tanah air mereka.

"Satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi adalah menyelesaikan akar konflik: Pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina," tutup pernyataan Kemlu.

Penolakan juga datang dari politisi AS sendiri. Senator Chris Murphy dari Partai Demokrat dengan tegas menyebut pernyataan Trump,

berbahaya.

"Dia benar-benar kehilangan akal," tulisnya di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Rabu (5/2/2025).

"Invasi AS ke Gaza akan menyebabkan pembantaian ribuan tentara AS dan perang selama puluhan tahun di Timur Tengah. Itu seperti lelucon yang buruk dan sakit," imbuhnya.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Jake Auchincloss juga mengkritik usulan tersebut sebagai tindakan yang sembrono dan bermotif politik.

"Usulan tersebut sembrono dan tidak masuk akal," katanya kepada NewsNation. Dia memperingatkan bahwa hal itu dapat membahayakan fase kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Dia juga mempertanyakan motivasi Trump, yang menunjukkan adanya kepentingan finansial pribadi akan masa depan Gaza.

"Seperti biasa, ketika Trump mengusulkan suatu kebijakan, ada hubungan nepotisme dan kepentingan pribadi," cetusnya.

Mengacu pada Trump dan menantunya Jared Kushner, dia menambahkan: "Mereka ingin mengubah ini menjadi resor." (afp, rtr, x, ist/dya)

AS Keluar dari Dewan HAM PBB dan Bekukan Dana untuk UNRWA

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menghentikan keterlibatan negaranya dengan Dewan HAM PBB. Trump juga membekukan pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB, UNRWA.

Dikutip dari Reuters, Rabu (5/2/2025), langkah ini diambil bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sudah lama bersikap kritis terhadap UNRWA, menuduh lembaga itu anti-Israel dan stafnya terlibat dalam aktivitas teroris terhadap Israel.

Plt juru bicara Dewan HAM PBB, Pascal Sim, mengatakan dia tidak mengetahui apakah ada komunikasi dari Washington, tapi tidak ada proses formal yang dilakukan karena AS bukanlah anggota yang memiliki hak suara.

Selama masa jabatan pertamanya pada 2017-2021, Trump juga memangkas pendanaan untuk UNRWA dan mempertanyakan nilai UNRWA.

Saat itu, Trump mengatakan warga Palestina harus setuju untuk memperbarui percapakan damai dengan Israel dan menyerukan

reformasi.

Pemerintahan Trump yang pertama juga menghentikan 47 anggota Dewan HAM PBB di tengah masa jabatan 3 tahun atas apa yang dia sebut bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

AS saat ini bukanlah anggota dari badan yang berkantor pusat di Jenewa itu. Di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, AS kembali terpilih menjadi anggota dan bertugas pada masa tugas 2022-2024.

Sebelumnya, utusan Biden untuk Dewan HAM PBB meminta Trump agar AS tetap aktif di badan itu, sebagian untuk melawan pengaruh China yang berbahaya.

Kelompok kerja Dewan HAM PBB akan meninjau catatan hak asasi manusia AS tahun ini, sebuah proses yang dijalani semua negara setiap beberapa tahun. Meski dewan tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, perdebatannya memiliki bobot politik dan kritikan dapat meningkatkan tekanan global pada pemerintah untuk mengubah arah.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari 2025, Trump telah memerintahkan AS

untuk keluar dari WHO dan perjanjian iklim Paris.

Saat ini, AS menyumbang 22% dari anggaran operasional PBB, menjadikannya kontributor terbesar dengan China sebagai penyumbang terbesar kedua.

"Saya selalu merasa PBB memiliki potensi besar," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih dikutip dari The Associated Press.

"Namun, saat ini mereka belum memenuhi potensi tersebut. Mereka harus memperbaiki diri," imbuhnya.

Diketahui, UNRWA didirikan pada 1949 untuk memberikan bantuan bagi pengungsi Palestina yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik Arab-Israel 1948.

Saat ini, badan tersebut menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan kemanusiaan kepada sekitar 5,5 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Sebelum perang pecah pada 7 Oktober, UNRWA mengoperasikan sekolah bagi 650.000 anak di Gaza serta berbagai layanan kesehatan dan distribusi bantuan pangan. (rtr, afp/dya)